

MEMBANGUN BENTENG ANTI-RADIKALISME

Roce Marsaulina, M. Pd.

Dosen STT Moriah

Abstrak

Situasi keagamaan di Indonesia belakangan ini mempertontonkan intoleransi. Ketika agama yang sakral dicampur adukan dengan politik yang profan akan memunculkan sisi pseudomis yang diejawantahkan dalam tindakan umat yang menyebut dirinya beragama. Kesakralan dan nilai-nilai regulitas agama menjadi ternoda dan mekanisme demokrasi politik menjadi tak sehat. Fenomena meluasnya semangat intoleransi yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia yang digaungkan oleh sekelompok ormas intoleran berhilir pada pertanyaan masihkan ideologi Pancasila dan gerakan antiradikalisme menjadi solusi.

Kata kunci: *Intoleransi, Pancasila, Antiradikalisme, Kemajemukan.*

The religious situation in Indonesia lately shows intolerance when a sacred religion mixed with profane politics will bring up the pseudomic side embodied in the actions of the people who say that they are religiously sacred and the value of religious regulity becomes tarnished and the mechanism of political democracy becomes unhealthy. the phenomenon of the dilution of the spirit of intolerance that occurs in a number of regions in Indonesia echoed by a group of intolerant organizations scattered on the question is the ideology of the Pancasila and the anti-radioalism ideology a solution.

Keywords; *Intolerance, Pancasila, Anti-radicalism, Pluralism*

Sepintas mengenai Radikalisme di Indonesia

Radikalisme adalah suatu paham yang menginginkan sebuah perubahan atau pembaruan dengan cara drastis hingga ke titik paling akar. Bahkan, untuk mencapainya melibatkan banyak cara hingga yang paling ekstrem: kekerasan baik simbolik maupun fisik. Paham radikalisme dapat digerakkan dalam berbagai momentum, apalagi dalam sesi pergerakannya terselip agenda politik kekuasaan tertentu, maka tidak menutup kemungkinan akan dimanfaatkan pihak-pihak lain, terutama kelompok ekstrem yang keberadaannya masih kecil, tetapi suaranya sangat berisik (*noisy minority*), untuk menjadikan gerakan radikalisme sebagai jebakan untuk membuat kegaduhan yang bisa memicu konflik horizontal.

Radikalisme agama yang sedang memperlihatkan perkembangannya yang semakin masif di Indonesia, menurut Muhammad A.S Hikam dalam bukunya *Deradikalisasi*¹ menerangkan bahwa gerakan ini secara umum bersumber kepada aliran Wahabisme yang menekankan kemurnian hidup agama sesuai dengan hukum agama; dalam skala global paham ini mendasari gerakan NIIS dan Al Qaeda (A.S Hikam, 2018: 1). Dalam identifikasinya, Prof. Azra juga menyebutkan unsur tersebut seraya menambahkan beberapa unsur lainnya sebagai ciri khas gerakan ini, yaitu menolak Pancasila, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI; mempraktikkan sikap *takfiri* yang mengafirkan rekan-rekan seagama yang berbeda pandangan; dan terakhir menolak toleransi dan kerja sama dengan penganut agama lain. Secara menyeluruh radikalisme agama adalah

¹ Muhammad Hikam, “Deradikalisasi Peran Masyarakat Sipil Membendung Radikalisme”, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2016.

gerak keagamaan berbasis kepada tafsiran literal hukum agama demi pemahaman dan praksis keagamaan yang lurus dan murni, dan karena itu menolak Pancasila dan toleransi. Sejak tahun 2002, Indonesia seolah menjadi tempat yang begitu rentan atas aksi terorisme. Dimulai di pulau dewata atau dikenal dengan tragedi bom Bali yang menelan lebih dari 200 korban jiwa. Tahun-tahun berikutnya, Indonesia kembali mengalami berbagai teror bom, seperti peristiwa bom hotel JW Mariot, Kedutaan Australia, bom Bali II, hingga Bom Kampung Melayu yang lagi-lagi harus merenggut nyawa korban yang tidak bersalah. Petaka ini tidak saja menjadi nestapa untuk bangsa Indonesia, tetapi merupakan petaka luar biasa untuk para korban dan keluarganya. Peristiwa-peristiwa teror terus terjadi. Karut-marut teror bom seolah tak pernah berhenti. Selain Al Qaeda, kelompok ISIS (Islamic State in Iraq and Syria) disebut-sebut sebagai dalang dari berbagai peristiwa teror yang sangat merugikan dan mengganggu kenyamanan hidup berbangsa dan bernegara.

Agama, Politik dan Kekuasaan: Kenyataan Berbangsa di Indonesia

“Secara khusus istilah agama menunjuk pada sebuah institusi (lembaga) dengan sekelompok orang-orang yang berkumpul secara teratur untuk suatu ibadah dan menerima seperangkat ajaran yang menawarkan cara menghubungkan individu dengan sesuatu yang dipandang sebagai hakikat

terdalam, tertinggi kenyataan.”² Banyak orang yang beranggapan bahwa agama memberikan kontribusi positif dalam masyarakat, itu memang bisa terjadi, tapi peran agama juga bisa memberikan kontribusi negatif dan perpecahan. Bertentangan dengan beberapa ahli teori, agama tidak hanya memainkan peranan yang integratif dan menciptakan harmoni sosial saja dalam masyarakat, tapi juga peranan memecah.³ Membaca pendapat ini, Geertz secara jelas melihat bahwa agama bisa membawa disintegrasi, seperti yang kita lihat sekarang ini.

Agama merupakan lembaga produksi kekuasaan-pengetahuan yang dahsyat, terutama dalam masyarakat seperti di Indonesia. Dia tidak bisa dilepaskan dari mekanisme dan teknik kekuasaan normatif dan disipliner.⁴ Bahkan pada awal kemerdekaan, gejala perpecahan tampak pada saat ada tekanan untuk melaksanakan “Piagam Jakarta”, tapi untungnya mendapatkan perlawanan dan hati besar para bapak bangsa yang menempatkan persatuan bangsa jauh lebih penting daripada sekedar syariat Islam yang harus dipaksakan.

Politik memiliki beberapa pengertian:⁵

1. Apa yang berhubungan dengan pemerintahan

² Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, hal.14, September 2005, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama

³ Clifford Geertz, *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, hal.475, 1981, Jakarta : PT Dunia Pustaka Jaya

⁴ Haryatmoko, *Kekuasaan Melahirkan Anti Kekuasaan*, Majalah Basis no.01-02, tahun 51, bulan Januari-Februari 2002.

⁵ Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, hal.857, September 2005, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama

2. Perkara mengelola, mengarahkan, dan menyelenggarakan kebijaksanaan umum dan keputusan-keputusan atau kebijaksanaan yang menyangkut partai-partai yang berperan dalam kehidupan bernegara.
3. Bidang studi yang berkaitan masalah-masalah sipil-sosial dan mengembangkan pendekatan-pendekatan terhadap pemecahan masalah-masalah tersebut.
4. Aktifitas yang berkaitan dengan relasi-relasi antara bangsa-bangsa dan kelompok-kelompok sosial lainnya, yang berhubungan dengan perkara penggunaan kekuasaan negara.

Politik merupakan bagian dari etika yang berurusan dengan manusia dalam kegiatan kelompok.⁶

Apa yang dibuat oleh para bapak bangsa Indonesia dalam mendefinisikan serta membuat konsep politik memang indah dan baik, tapi dalam praktek sering melenceng, sebut saja “Demokrasi terpimpin” yang dicanangkan oleh Soekarno dan “Demokrasi Pancasila” yang dikumandangkan oleh Soeharto. Dalam prakteknya, peran agama tidak dapat dihapuskan begitu saja dan dikotomi mayoritas-minoritas melekat, apalagi agama yang digaungkan sebagai semangat yang mendasari semua aspek kehidupan, sehingga pada awal proses kelahiran republic ini juga terjadi benturan yang mengatas-namakan agama. “Piagam Jakarta”⁷ adalah contoh yang tidak lekang hingga hari ini, tidak kurang dari beberapa tokoh, seperti Yusril Ihza Mahendra yang hendak menghidupkan kembali “Piagam Jakarta” menunjukkan bahwa agama tidak begitu saja bisa

⁶ Ibid.

⁷ <http://artawarga.gunadarma.ac.id/2011/06/demokrasi-pancasila-demokrasi-liberal/> (diakses pada tanggal 21 Desember 2018 jam 09.18).

lepas dari factor politik, karena kata “secular” adalah kata yang tabu bagi beberapa kelompok tertentu. Padahal pasal tentang agama juga ada dalam UUD 1945 pasal 29, yang isinya sebagai berikut :

- (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
- (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Agama juga menjadi bagian dari politik dengan dibentuknya departemen agama⁸ setelah berdirinya Republik Indonesia dengan berbagai direktorat jendral seperti ditjen Bimas Hindu Buddha, ditjen Bimas Kristen, ditjen Bimas Islam, yang menunjukkan peran negara dalam urusan agama.

Agama bisa dikatakan membentuk subjektifitas individu dan akan mempengaruhi pandangan individu itu tentang politik, ekonomi dan agama itu sendiri. Perlu disadari bahwa agama menjadi soko guru ekonomi dan politik selama berabad-abad, kemudian sekularisme, liberalisme berkembang dan memisahkan agama dengan negara. Dalam bentuk masyarakat liberal, merupakan masyarakat yg terbuka, lingkungan yang bebas dan toleran, yang memberikan rentang pengejaran tujuan hidup seluas mungkin bagi anggotanya, serta konsisten dengan prinsip kesetaraan dalam memberi peluang bagi semua orang. Rawls berpendapat bahwa nilai dasar (kebebasan, hak,

⁸ Isi Piagam Jakarta sebagai berikut: (1)Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, Kemanusiaan yang adil dan beradab (3) Persatuan Indonesia (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan (5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

kesempatan, pendapatan, milik, dan hormat) dijamin dalam masyarakat plural dengan mengakui prinsip kebebasan dan perbedaan. Sebenarnya bangsa Indonesia juga mengenal “Bhinneka Tunggal Ika” yang semestinya bisa menerima dan menampung masyarakat majemuk.

Di saat menjelang kemerdekaan, dibuat rumusan mengenai isi Pancasila, Soekarno menggagas Pancasila dengan tidak menempatkan unsur religious di urutan pertama dan tidak menggunakan kata “Yang Maha Esa” tapi menggunakan “Yang Berkebudayaan”. Namun begitu, penting untuk mengetahui bahwa Soekarno juga mengusulkan redaksi yang berbeda dengan yang kita baca sekarang mengenai sila ketuhanan itu. Yang diusulkan Soekarno adalah “Ketuhanan yang berkebudayaan, ketuhanan yang berbudi pekerti yang luhur, ketuhanan yang hormat menghormati satu sama lain.”⁹

Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa sebenarnya terselip pesimisme dari Soekarno sendiri jika negara yang akan dibentuk itu terlalu kental dengan nuansa agama. Pesimisme itu kemudian tampak nyata di kemudian hari. Hari-hari ini kita menyaksikan bagaimana sila pertama digunakan oleh sejumlah kalangan untuk membatasi kebebasan beragama. Sila pertama digunakan untuk mendiskriminasi yang lain.¹⁰ Contoh yang menimpa pertama kali adalah terhadap agama Hindu, pembentukan ditjen Hindu Buddha di Departemen Agama harus melalui perjuangan, tidak serta merta dimasukkan sebagai

⁹ Saidiman Ahmad, “*KeTuhanan Yang Berkebudayaan*” <http://islamlib.com/id/artikel/ketuhanan-yang-berkebudayaan> (diakses pada tanggal 21 Desember 2018 jam 12.34)

¹⁰ Ibid.

agama. Di website resmi Ditjen Hindu Buddha ditulis secara jelas bahwa “Dalam periode ini pula di Bali timbul suatu reaksi, didasari oleh karena agama Hindu Bali itu dianggap sebagai suatu aliran/kepercayaan, sehingga timbul perjuangan untuk menyatakan agama Hindu sebagai agama bukan sebagai aliran, sehingga tahun 1952 khususnya untuk penduduk yang beragama Hindu di Bali oleh pemerintah daerah Bali dengan membentuk kantor Dinas Urusan Agama Otonomi. Umat Hindu di Bali tidak ada hentinya untuk terus mengupayakan serta mengusahakan dan memohon kepada pemerintah agar Agama Hindu diberikan tempat di lingkungan Departemen Agama RI. Tuntutan ini baru terlaksana pada tahun 1960 dengan dibentuknya bagian Urusan Hindu Bali pada Departemen Agama Republik Indonesia.”¹¹ Jadi pesimisme Soekarno sudah terbukti dengan kasus yang menimpa agama Hindu. Apakah penerapan konsep monotheisme dalam Pancasila hanya bernuansa agama ? Bagi penulis, selain bernuansa agama juga bernuansa politik. Karena dengan menempatkan monotheisme dalam Pancasila, maka kekuasaan politis sudah didapat oleh agama-agama montheisme yang mana nantinya akan menjadi dasar hukum tentang agama di Indonesia. Akibatnya adalah termarjinalkannya agama-agama rakyat atau agama-agama asli penduduk di banyak tempat di Indonesia.

Dalam kancah perpolitikan Indonesia, agama juga bertarung di kancah politik. Partai Katholik, Partindo, Masyumi, partai Nahdatul Ulama, adalah contoh partai yang

¹¹ <http://bimashindu.kemenag.go.id/sejarah-dan-kepemimpinan/> (diakses pada tanggal 20 Desember 2018 jam 13.41)

berbasiskan agama di masa Orde Lama, sedangkan di masa Orde Baru, partai Katolik dan Kristen dilebur ke dalam Partai Demokrasi Indonesia, partai Islam dilebur kedalam Partai Persatuan Pembangunan. Pertarungan antara partai agama non Islam biasanya berkoalisi dengan partai-partai nasional sebagai penyeimbang partai-partai Islam¹² dan pola ini bisa kita lihat pada masa Orde Baru, dimana PDI dan PPP saling bersaing, dan Golkar tidak terkalahkan dalam pemilu yang berat sebelah pada masa Orde Baru.

Ekonomi merupakan salah satu soko guru pembangunan, karena tanpa adanya kekuatan ekonomi, maka institusi politik dan agama juga tidak dapat berkembang, dan juga pelaku ekonomi memerlukan perlindungan dari pelaku politik maupun agama. Ketiga hal itu tidak dapat dipisahkan dan saling terkait dalam masyarakat Indonesia, terutama sekarang ini. “*Money to buy power, power to buy money*” sangat tepat menggambarkan hubungan antara kekuasaan dan uang, dimana kekuasaan itu tidak selalu kekuasaan yang bersifat politis, juga bersifat agamis dan ekonomi (uang) juga merupakan bentuk kekuasaan. Ekonomi juga menjadi salah satu sorotan penting institusi agama. Kapitalisme dikaitkan dengan Kristen Protestan. Tulisan Weber tentang *The Protestant Ethic and Spirit of Capitalism* menunjukkan keterkaitan doktrin agama dengan semangat kapitalisme. Etika Protestan tumbuh subur di Eropa yang dikembangkan oleh Calvin, yang menyatakan seorang pada intinya sudah ditakdirkan untuk masuk surga atau neraka. Keberhasilan kerja dan kemakmuran saat di dunia menentukan apakah masuk surga atau neraka. Jika

¹² Benny G Soetiono, “*Tionghoa Dalam Pusaran Politik*”, 642.

seseorang sukses secara materi maka hampir dapat dipastikan bahwa ia ditakdirkan menjadi penghuni surga, namun jika sebaliknya kalau di dunia ini selalu mengalami kegagalan maka dapat diperkirakan seorang itu ditakdirkan untuk masuk neraka. Karena itu amat wajar jika kapitalisme dikaitkan dengan agama Protestan. Sedangkan Islam juga menganut system ekonomi menurut syari'at agama. Hukum yang mengatur hubungan antar sesama manusia digolongkan dalam bab mu'amalah.¹³ Yang mana mempengaruhi pula pertentangan antara agama Kristen dan Islam di bidang ekonomi.

Untuk masalah agama dan politik bisa kita telaah tentang Inpres 14/1967 yang dikeluarkan oleh Soeharto tentang agama dan kepercayaan orang Tionghoa Yang merupakan bentuk pertarungan politik antara dua kelompok yang kemudian lari ke masalah agama. Anggota LPKB selaku penggagas asimilasi dan Baperki yang mendukung integrasi bertarung di ranah politik dan kejadian G30S mengakhiri Baperki. Pertarungan antara dua kelompok di bidang politik merambah hingga masalah kepercayaan. Ada satu hal menarik adalah pengaruh Inpres 14/1967 memberikan sumbangan terhadap perkembangan agama Kristen Katolik dikalangan etnis Tionghoa yang melejit pasca G30S. Sindhunata mengaku secara gambling bahwa ia yang mengusulkan kepada presiden Soeharto agar seluruh tradisi, adat istiadat, kepercayaan, dan agama etnis Tionghoa dilarang di Indonesia.¹⁴

¹³ Syamsul Rijal Hamid, *Buku Pintar Agama Islam*, hal.425, cet.IV, Januari 2010, Bogor : LPKAI "Cahaya Salam".

¹⁴ Benny G Soetiono, "Tionghoa Dalam Pusaran Politik", 818.

Pada masa Orde Baru terjadi sinergi antara orang Tionghoa yang beragama Katolik dengan politik yang jelas terpapar. Benny G Soetiono menulis:

Sementara itu para tokoh peranakan Tionghoa yang pada umumnya berkerumun di sekitar Partai Katholik/PMKRI/LPKB di bawah koordinasi Pater Beek dan dukungan Mayjen Ali Moertopo dan Mayjen Soedjono Hoemardani - keduanya pimpinan Operasi Khusus (Opsus) dan Asisten Pribadi (Spri/Aspri) Presiden Soeharto - pada 1 September 1971 mendirikan Centre for Strategic and International Studies (CSIS). Lembaga inilah yang dijadikan "think tank", peletak dasar konsep pemerintahan dan kebijaksanaan politik Orde Baru.¹⁵

Setelah CSIS berdiri, banyak tuduhan bahwa CSIS ini berperan menekan kaum Muslim di berbagai bidang dan mengutamakan kemajuan ekonomi pada kelompok Tionghoa. Sehingga pada masa kejatuhan Orde Baru, CSIS sering diejek dengan sebutan "Cina Senang Indonesia Susah". Untuk mengurai peranan pater Beek dan CSIS ini terus-terang amat sulit mendapatkan data-datanya, sehingga apa yang tersebar adalah rumour, tapi seandainya benar sekalipun, maka ini adalah covert operation intelejen yang tertutup, maka adalah hal yang wajar jika data-data itu tidak tersedia. Pandangan kaum muslim fundamentalis terhadap CSIS dan Benny Moerdani yang diasosiasikan sebagai kelompok Kristen Katolik sebagai pelaku penindas agama Islam di Indonesia meninggalkan bomb waktu yang meledak pada masa reformasi dan pasca reformasi.

¹⁵ Benny G Soetiono, "Tionghoa Dalam Pusaran Politik", 825.

Jejak-jejak itu dapat dilihat betapa kerasnya kaum muslim terhadap umat Kristiani dan pembenaran tindakan radikal mereka itu salah satunya adalah alasan bahwa CSIS sebagai lembaga think-tank orde baru adalah Katolik. Dampak lainnya adalah, jika pada masa awal Orba terjadi kerusuhan rasial yang menimpa etnis Tionghoa, tidak terdengar adanya pembakaran gereja, tapi di tahun 1990an, kerusuhan rasial itu disertai dengan pembakaran gereja. Sehingga pada tahun 1990 lahir Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang kemudian menjadi batu sandaran Soeharto berkuasa. Penulis beranggapan bahwa ICMI dibentuk karena adanya suatu upaya dari kaum muslim untuk merebut pengaruh di bidang politik, kebetulan pada tahun 1980an akhir dan 1990an awal, kekuatan Soeharto sudah mulai melemah dan untuk mempertahankan status quo, Soeharto harus mencari dukungan kaum muslim. Tapi sebagai catatan, tidak semua orang Islam setuju dengan ICMI, salah satunya adalah ketua umum Pengurus Besar Nahdatulul Ulama, K.H Aburrahman Wahid yang mengkritik keras pembentukan ICMI.¹⁶

Pertarungan elit politik yang merambah di berbagai bidang, memicu kekerasan fisik yang diselubungi agama tapi isinya adalah kepentingan ekonomi. George Aditjondro dalam konflik Ambon atau Maluku mengupas adanya kepentingan ekonomi dibalikinya. Dalam tulisan Geoge J Aditjondro “Orang-Orang Jakarta di Balik Tragedi Maluku”¹⁷ menuliskan

¹⁶ Benny G Soetiono, “Tionghoa Dalam Pusaran Politik”, 864.

¹⁷ George J Aditjondro, “Orang-Orang Jakarta di Balik Tragedi Maluku”, <http://www.michr.net/orang-orang-jakarta-di-balik-tragedi-maluku.html> (diakses tanggal 20 Desember jam 13.14)

bahwa konflik Ambon atau Maluku bermuasal dari perebutan politik tahun 1999 dan ada yang menarik adalah ternyata orang Maluku menghargai kemajemukan beragama, terutama Kristen dan Islam yang bisa berdampingan tapi dirusak oleh kepentingan politik dan uang.

Orde Baru yang melahirkan CSIS dan ICMI melahirkan konflik horizontal yang tidak terasa saat itu tapi buahnya kita rasakan sekarang ini, sedangkan sekarang ini banyak daerah yang karena adanya otonomi daerah melahirkan perda yang berdasarkan syariah Islam, sebenarnya itu hanya demi meraih populasi dengan menjual agama. Kasus Perda No.8 Tahun 2005 kota Tangerang yang melarang wanita keluar malam juga memancing kekisruhan dan rasa tidak nyaman bagi kaum wanita, terutama masalah busana bagi kaum non Muslim, selain itu juga bisa menjadi upaya pengalihan issue yang penting, seperti kesejahteraan masyarakat jauh lebih penting daripada sekedar remeh temeh yang terkait dengan busana.

Kita bisa melihat betapa perebutan dan upaya mempertahankan kekuasaan sudah mendarah daging dalam peradaban manusia, sehingga Indonesia sendiri tidak bisa luput dari hal itu. Hubungan antara agama, politik dan ekonomi tidak bisa dipisahkan begitu saja, interaksi simbolisme bisa terjadi dengan mudah, seperti ICMI yang dikaitkan dengan Islam, padahal tidak semua muslim setuju, begitu pula CSIS yang segelintir tokohnya non muslim dan dari etnis Tionghoa bisa melahirkan konflik dan derita di kalangan rakyat jelata yang tidak tahu menahu perilaku para tokoh tersebut, yang mana konflik itu disebabkan issue-issue yang dihembuskan oleh para tokoh yang menentang CSIS. Dan sekarang issue yang lebih

parah lagi timbul, Tionghoa adalah Kristen, yang mana akan menyengsarakan Tionghoa non Kristen karena stigma yang dilekatkan itu.

Pancasila dengan sila KeTuhanan Yang Maha Esa, menurut penulis adalah kolaborasi antara agama dan politik, dalam hal ini adalah agama samawi ternyata juga meninggalkan torehan luka mendalam bagi para penganut agama-agama rakyat. Hak-hak beragamanya dilenyapkan dan dipaksa menerima Tuhan Yang Maha Esa, bisa dibayangkan bagaimana kepercayaan suku Dayak yang polytheisme itu harus menganut monotheisme, atau agama Buddha yang menganut nontheisme terpaksa mengadopsi konsep KeTuhanan Yang Maha Esa itu. Ini sudah sangat jelas tidak sesuai dengan masyarakat Indonesia yang majemuk juga dengan Bhinneka Tunggal Ika.

Pancasila VS Radikalisme

Pertanyaannya kemudian tentulah, apa yang sebenarnya terjadi di negeri ini? Menurut Guru Besar Ilmu Politik Universitas Pertahanan yang juga dikenal sebagai pengamat terorisme, Profesor Salim Said, kehadiran terorisme harus dilihat dalam konteks sosial politik dan sejarah, terutama di Indonesia. “Kita harus mencari apa yang sebenarnya terjadi. Saya lebih melihatnya sebagai masalah politik ketimbang agama. Kenapa ada anak bangsa yang mau berangkat ke Syria dan bergabung dengan ISIS. Anehnya, mereka berangkat membawa anak istri dan keluarganya. Apa yang mereka cari, dan seterusnya. Selain itu masih banyak persoalan di Indonesia yang membutuhkan diskusi panjang untuk itu,” ujarnya dalam suatu kesempatan.

Setiap individu adalah bagian dari satu komposisi majemuk Indonesia yang diberi nama Pancasila. Dan salah satu bagian penting dari kemajemukan Indonesia adalah orang Islam. “Tetapi kita ini siapa? Sebagian besar dari kita Pancasilais, tapi tahukah Anda dengan sebagian besar dari mereka yang ada di luar sana? Mereka yang ternyata sangat mudah untuk diprovokasi,” ungkapnya.

Di situlah akar masalahnya. Apa sebenarnya yang terjadi di dunia ini, khususnya di Timur Tengah? Pertama, menurut Prof. Salim Said, awal dari cerita berdirinya ISIS adalah perang dingin Suni melawan Syiah di Irak. Akar dari terbentuknya ISIS adalah Al Qaeda yang menjadi kelompok radikal yang terpicu oleh krisis kepercayaan orang Islam di Timur Tengah. Situasi konflik itu kemudian melahirkan chaos berkepanjangan, hingga muncul satu tokoh yang menjadi khalifah. Situasi tersebut kemudian dimanfaatkan sebagai permainan intel barat. Kata kuncinya adalah faham radikal seperti ISIS jangan sampai terjadi di Indonesia. Ketika Indonesia semakin kacau, maka teroris akan mendapat kesempatan, dan jika benar ISIS sampai berada di Indonesia, kemungkinan konflik yang terjadi bisa lebih parah daripada yang terjadi di Timur Tengah. Karena, Indonesia adalah negeri majemuk yang sangat luas. Akulturasinya sudah terlalu dalam, sehingga proses menjadi Indonesia harus berjalan seutuhnya. Karena itulah, harus dibangun gerakan antiteroris yang Indonesiawi untuk menyelamatkan Indonesia dalam konteks keindonesiaan.

Hasil penelitian Pusat Penelitian Alvara di bulan September-Oktober 2017 lalu yang dibukukan dengan

judul *Radicalism Rising Among Educated People?*¹⁸ dalam pengantarnya mengemukakan bahwa radikalisme agama yang berkembang secara global, terutama di Timur Tengah bahkan di Indonesia adalah pandangan yang sempit keagamaan yang pada akhirnya mengajarkan intoleransi dan kekerasan berbasis pada fanatisme agama. Watak dasar radikalisme agama demikian sungguh bertolak belakang dengan Pancasila. Sebagai pondasi dan jiwa yang mendasari bangunan bangsa dan negeri ini, kehadiran Pancasila pertama-tama justru melindungi dan menjamin keberagaman identitas primordial masyarakat bangsa Indonesia. Dalam arti itu, Pancasila menuntun bangsa ini untuk bersikap inklusif, moderat dalam menampilkan identitas kesukuan dan keagamaan kita, toleran dan gotong royong sebagai kepribadian khas bangsa Indonesia yang takdirnya adalah majemuk. Oleh Pancasila, keberagaman tidak dibungkan dan disamakan, melainkan dibiarkan hidup berkembang. Hal itu terlihat nyata pada kebijakan negara yang menjamin hak beragama dan beribadah setiap warganya sesuai dengan nilai agama dan kepercayaannya masing-masing. Dan apapun latar belakang primordial warga bangsa ini, setiap orang memiliki kesetaraan di hak dan kewajiban dihadapan hukum negara. Fungsi dan peranan Pancasila sebagai sumber hukum antara lain: Pertama, sebagai perekat kesatuan hukum nasional dalam arti setiap aturan hukum yang mengatur segi kehidupan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila sebagai filsafat, pandangan hidup dan dasar negara. Kedua, sebagai cita-cita hukum nasional bermakna bahwa seluruh aturan yang timbul

¹⁸ Hasanudin Ali & Lilik Purwandi, *Radicalism Rising Among Educated People?*, Jakarta: Alvira Research Institute, Juni 2018.

dan mengatur kehidupan masyarakat dibentuk untuk mewujudkan cita-cita berbangsa dan bernegara yang didasarkan pada nilai Pancasila yang utuh.¹⁹

Refleksi Teologis terhadap Kemajemukan Agama di Indonesia

Salah satu cara terbaik ialah berperilaku rendah hati kepada sejarah. Karena proses menjadi Indonesia itu sebenarnya belum selesai. Lalu kembali kepada khittah nasionalisme. Dimana harus ditekankan secara terus menerus bahwa nasionalisme adalah suatu paham kebangsaan yang mengandung makna: kesadaran dan semangat cinta tanah air; memiliki kebanggaan sebagai bangsa, atau memelihara kehormatan bangsa; memiliki rasa solidaritas terhadap musibah dan kekurangberuntungan saudara setanah air, sebangsa dan senegara; persatuan dan kesatuan. Nasionalisme harus diartikan sebagai sikap politik dan sosial dari sekelompok bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan, bahasa dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan dengan meletakkan kesetiaan yang mendalam terhadap kelompok bangsanya. Sudah pasti, nasionalisme bukan lah yang serta merta tumbuh begitu saja. Tetapi berbasis pada sejarah, cita-cita para para founding fathers, kecintaan dan pengetahuan pada wilayah dimana kaki berpijak, potensi-potensinya, nilai kearifan lokal, hingga budaya gotong-royong yang merupakan ciri bangsa ini

¹⁹ Erfan Helmi, *Filsafat Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2012).

sejak jaman nenek moyang. Untuk membangun bangsa yang solid, tentunya dimulai dari masyarakat yang berpengetahuan. Pengetahuan yang paling mendasar adalah pengetahuan akan jatidiri, asal usul serta nilai-nilai yang dimiliki sebagai identitas yang khas. Indonesia adalah negara kesatuan, yang merupakan perpaduan dari suku dan ras yang ada di berbagai daerah, yang penuh dengan toleransi.

Pemahaman yang kuat terhadap semua unsur nasionalisme itu seharusnya menjadi sikap utuh seluruh anak bangsa Indonesia, sehingga tidak mudah terprovokasi dan menciptakan peristiwa yang mengarah kepada perpecahan. Mampu menjadi benteng untuk mencegah berkembangnya radikalisme dan terorisme. Bahkan, menjadi titik balik bagaimana mereka yang terlanjur terpapar paham radikal atau ikut dalam aksi terorisme bisa melihat bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan hanya akan menghasilkan korban dari manusia yang tidak bersalah, dan menimbulkan nestapa berkepanjangan.

Keragaman dan Kemajemukan adalah sebuah keindahan yang Tuhan sediakan bagi hidup manusia. Itulah makna keragaman dan kemajemukan yang harus kita hayati dari perspektif iman. Tugas kita adalah harus terus menjaga dan merawat keragaman dan kebersamaan itu dimulai dari lingkup keluarga, tetangga, masyarakat dan bangsa ini sesuai dengan ajaran Agamanya, tetapi juga sesuai prinsip kebangsaan kita "Bhineka Tunggal Ika", berbeda-beda tetapi tetap satu. Umat beragama termasuk umat Kristen harus bisa menjaga keragaman dan kemajemukan ini dengan sebaik-baiknya.

Di hari-hari terakhir pelayanan fana-Nya, Yesus memberikan kepada para murid-Nya apa yang Dia sebut “perintah baru” (Yohanes 13:34). Diulangi tiga kali, perintah itu sederhana namun sulit: “Saling mengasihi, seperti Aku telah mengasihi kamu” (Yohanes 15:12; lihat juga ayat 17). Ajaran untuk saling mengasihi telah menjadi ajaran sentral dari pelayanan Juruselamat. Perintah besar kedua adalah “Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri” (Matius 22:39). Yesus bahkan mengajarkan, “Kasihilah musuhmu” (Matius 5:44). Tetapi perintah untuk *mengasihi orang lain sebagaimana Dia telah mengasihi kawanan domba-Nya* adalah bagi para murid-Nya—dan bagi kita—sebuah tantangan yang unik.

Injil memiliki banyak ajaran mengenai menaati perintah sementara hidup di antara orang-orang yang berbeda kepercayaan dan kebiasaan. Ajaran mengenai perselisihan adalah penting. Namun jika sewaktu kita mengupayakan untuk menjadi lembut hati dan menghindari perselisihan sekalipun, kita tidak boleh berkompromi atau melemahkan komitmen kita terhadap kebenaran-kebenaran yang kita pahami. Juruselamat memperlihatkan caranya ketika para lawan-Nya menghadapkan kepada-Nya perempuan yang telah “tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina” (Yohanes 8:4). Ketika merasa malu dengan kemunafikan mereka sendiri, para penuduh itu menarik diri dan meninggalkan Yesus sendirian dengan perempuan itu. Dia memperlakukan perempuan itu dengan kebaikan hati dengan menolak untuk menghukum dia pada waktu itu. Tetapi Dia juga dengan tegas mengarahkan dia untuk “jangan berbuat dosa lagi” (Yohanes 8:11). Kebaikan hati yang penuh kasih diperlukan, namun pengikut Kristus—sama seperti sang Guru—akan teguh dalam kebenaran.

Eka Dharmaputra berbicara tentang peran Gereja di Indonesia ketika menyampaikan pemaparannya dalam Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia 2005. Dua kata kunci: signifikan, dan relevan. Kalau Gereja hendak sungguh berperan di Indonesia, maka Gereja harus signifikan dan relevan. Signifikan berarti bahwa Gereja harus bermakna bagi umatnya sendiri. Karena imannya umat bertumbuh semakin dewasa dalam Kristus. Dan, Gereja juga harus relevan. Relevan berarti bahwa Gereja juga harus bermakna bagi kehidupan Indonesia. Kehadirannya tidak menjadi ancaman, tetapi menjadi berkah. Terinspirasi dari sikap orang Samaria yang baik, umat Kristiani seharusnya bersikap sama terhadap sesamanya. Jalan dari Yerusalem adalah jalan tidak peduli, acuh tak acuh terhadap korban. Sebaliknya jalan dari Yeriko ke Yerusalem adalah jalan kepedulian, yang ditunjukkan oleh orang Samaria terhadap korban. Hidup kita adalah suatu perjalanan. Kita berjalan bersama dengan yang lain, sesama kita. Semoga dalam perjalanan hidup ini kita memiliki hati yang mudah tergerak oleh belaskasihan kepada sesama kita.

DAFTAR PUSTAKA

Benny G Soetiono, “Tionghoa Dalam Pusaran Politik”,

Clifford Geertz, *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, hal.475, 1981, Jakarta : PT Dunia Pustaka Jaya

Erfan Helmi, *Filsafat Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2012).

George J Aditjondro, “**Orang-Orang Jakarta di BalikTragedi Maluku**” <http://www.michr.net/orang>

-orang-jakarta-di-balik-tragedi-maluku.html (diakses tanggal 20 Desember jam 13.14)

Haryatmoko, *Kekuasaan Melahirkan Anti Kekuasaan*, Majalah Basis no.01-02, tahun 51, bulan Januari-Februari 2002.

Hasanudin Ali & Lilik Purwandi, *Radicalism Rising Among Educated People?*, Jakarta: Alvara Research Institute, Juni 2018.

Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, hal.14, September 2005, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama

Muhammad Hikam, “Deradikalisasi Peran Masyarakat Sipil Membendung Radikalisme”, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2016.

Saidiman Ahmad, “*KeTuhanan Yang Berkebudayaan*”<http://islamlib.com/id/artikel/ketuhanan-yang-berkebudayaan> (diakses pada tanggal 21 Desember 2018 jam 12.34)

Syamsul Rijal Hamid, *Buku Pintar Agama Islam*, hal.425, cet.IV, Januari 2010, Bogor : LPKAI “Cahaya Salam”. Desember 2018 jam 13.41

<http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/06/demokrasi-pancasila-demokrasi-liberal/> (diakses pada tanggal 21 Desember 2018 jam 09.18).

George J Aditjondro, “**Orang-Orang Jakarta di Balik Tragedi Maluku**”

<http://www.michr.net/orang-orang-jakarta-di-balik-tragedi-maluku.html> (diakses tanggal 20 Desember jam 13.14)